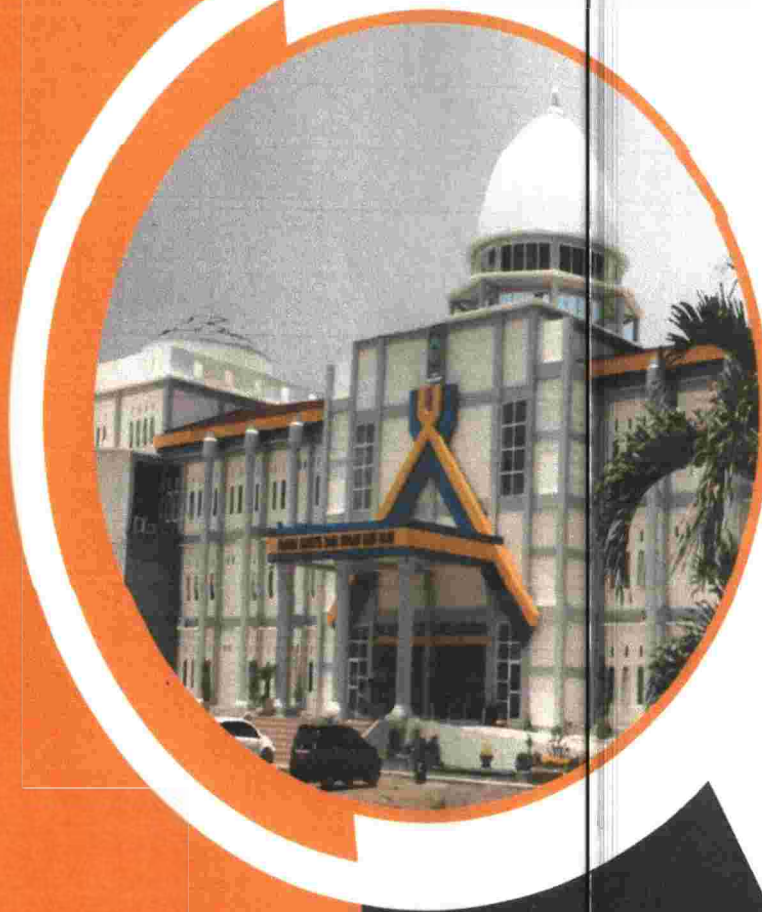




**PEMERINTAH
KABUPATEN DOMPU**

**TAHUN
ANGGARAN
2021**



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPA'TEN DOMPU**



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

(APBDP) Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 07);

14. Peraturan Bupati Dompu Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 316).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan perubahan SAL;
- c. Laporan operasional;
- d. Laporan perubahan ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan arus kas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar laporan keuangan desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp1.065.607.792.214,05
b. belanja dan transfer	<u>Rp1.045.715.132.020,52</u>
surplus/ defisit	Rp19.892.660.193,53
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp51.846.193.454,82
- pengeluaran	<u>Rp0,00</u>
Pembiayaan netto	Rp51.846.193.454,82

Pasal3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 37.713.878.711,05 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.027.893.913.503,00
2. realisasi pendapatan selisih Lebih/kurang	<u>Rp1.065.607.792.214,05</u> Rp37.713.878.711,05
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp33.603.389.303,48 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp1.079.318.521.324,00
2. realisasi belanja selisih Lebih/kurang	<u>Rp1.045.715.132.020,52</u> (Rp33.603.389.303,48)
c. selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp31.531.947.627,47) dengan rincian sebagai berikut:	
1. surplus/(defisit) anggaran	(Rp51.424.607.821,00)
2. surplus/(defisit) realisasi selisih lebih/kurang	<u>Rp19.892.660.193,53</u> (Rp31.531.947.627,47)
d. selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp270.414.366,18 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran penerimaan pembiayaan	

Setelah perubahan	Rp52.116.607.821,00
2. realisasi penerimaan pembiayaan	<u>Rp51.846.193.454,82</u>
selisih lebih/kurang	Rp270.414.366,18
e. selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp692.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp692.000.000,00
2. realisasi pengeluaran pembiayaan	<u>Rp0,00</u>
Selisih lebih/kurang	Rp692.000.000,00
f. selisih anggaran pembiayaan <i>netto</i> dengan realisasi pembiayaan <i>netto</i> sejumlah Rp421.585.633,82 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran pembiayaan <i>netto</i> setelah perubahan	Rp51.424.607.821,00
2. realisasi pembiayaan <i>netto</i>	<u>Rp51.846.193.454,82</u>
Selisih lebih/kurang	Rp421.585.633,82

Pasal 4

Laporan Perubahan SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp52.116.607.821,48
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp51.821.928.840,82</u>
total (a-b)	Rp294.678.980,66
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp71.723.230.648,35</u>
total SILPA/SIKPA	Rp72.017.909.629,01
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	(Rp279.055.980,66)
e. lain-lain	<u>Rp0,00</u>
f. Saldo anggaran lebih akhir $\{(a-b)+c+d+e\}$	Rp71.738.853.648,35

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pos operasi

- pendapatan	Rp970.350.270.308,45
- beban	<u>Rp990.153.846.013,13</u>
surplus/defisit dari operasi	(Rp19.803.575.704,68)
b. surplus/defisit dari keg. non operasional	
- surplus dari kegiatan Non operasional lainnya	Rp40.958.550,25
- defisit dari kegiatan non operasional lainnya	<u>Rp3.562.198.295,00</u>
jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(Rp3.521.239.744,75)
c. surplus/defisit sebelum pos luar biasa (a+b)	(Rp23.324.815.449,43)
d. pos luar biasa	
- pendapatan luar biasa	Rp0,00
- beban luar biasa	<u>Rp363.087.750,00</u>
Jumlah pos luar biasa	(Rp363.087.750,00)
e. surplus/defisit LO (c+d)	(Rp23.687.903.199,43)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. ekuitas Awal	Rp1.711.472.391.233,87
b. surplus/defisit-LO	(Rp23.687.903.199,43)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:	23.806.964.283,80
ekuitas akhir	Rp1.711.591.452.318,23

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp1.728.778.670.571,28
b. jumlah kewajiban	Rp17.187.218.253,05
c. jumlah ekuitas	Rp1.711.591.452.318,23

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. saldo kas 1 januari 2021	Rp 52.379.068.938,24
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 157.495.063.538,05
c. arus kas bersih dari aktivitas Investasi	(Rp137.602.403.344,52)
d. arus kas bersih dari aktivitas Dana	Rp 8.641.614,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran	(Rp287.557.914,59)
f. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp 308.001.766,00
g. saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran dan FKTP (Puskesmas)	Rp 57.674.700,00
h. saldo kas akhir per 31 desember tahun 2021	Rp 72.116.620.378,35

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran I.4 : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan

- lampiran XX.1 : Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Dietapkan di Dompu
pada tanggal 28 Juli 2022

WAKIL BUPATI DOMPU,


H. SYAHRUL PARSAN

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 28 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN PP, SKM., M.Kes

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pada pokoknya Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang Peranggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan selanjutnya pada Pasal 320 ayat (2) menyebutkan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Laporan Keuangan ini menjadi salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dari segi manfaat (*outcome*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

CukupJelas

Pasal5

CukupJelas

Pasal6

CukupJelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal9

CukupJelas

Pasal 10

CukupJelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas




PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I
Perda Pertanggunjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2021 Kab. Do
Nomor : 01 Tahun 2022
Tanggal : 28 Juli 2022

OMOR JRUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.027.893.913.503,00	1.065.607.792.214,05	37.713.878.711,05	103,67
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	88.468.824.005,00	125.823.619.290,05	37.354.795.285,05	142,22
1.2	Pendapatan Pajak Daerah	12.177.405.700,00	14.623.657.026,25	2.446.251.326,25	120,09
1.3	Pendapatan Hasil Pengeldaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.866.153.216,00	4.824.897.543,00	958.744.327,00	124,80
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.411.393.010,00	7.581.100.537,00	6.169.707.527,00	537,14
2	PENDAPATAN TRANSFER	71.013.872.079,00	98.793.964.183,80	27.780.092.104,80	139,12
2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	883.495.249.866,00	893.581.938.570,00	10.086.688.704,00	101,14
2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	737.459.148.000,00	747.467.753.727,00	10.008.605.727,00	101,36
2.1.3	Dana Alokasi Umum	27.953.681.000,00	39.824.605.530,00	11.870.924.530,00	142,47
2.1.4	Dana Alokasi Khusus	536.299.165.000,00	536.299.165.000,00	0,00	100,00
2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	173.206.302.000,00	171.343.983.197,00	(1.862.318.803,00)	98,92
2.2.2	Dana Penyesuaian	101.896.904.000,00	101.896.904.000,00	0,00	100,00
2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	101.896.904.000,00	101.896.904.000,00	0,00	100,00
2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44.139.197.866,00	44.217.280.843,00	78.082.977,00	100,18
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	44.139.197.866,00	44.217.280.843,00	78.082.977,00	100,18
3.1	Pendapatan Hibah	55.929.839.632,00	46.202.234.354,00	(9.727.605.278,00)	82,61
1	BELANJA	1.079.318.521.324,00	1.045.715.132.020,52	(33.603.389.303,48)	96,85
1	BELANJA OPERASI	915.257.653.955,00	906.544.477.528,00	(8.713.176.427,00)	99,05
1.1	Belanja Pegawai	431.802.418.439,00	409.302.759.598,00	(22.499.658.841,00)	94,75
1.2	Belanja Barang	269.762.844.308,00	285.198.939.307,00	15.436.094.999,00	105,71
1.5	Belanja Hibah	79.571.230.608,00	77.923.118.023,00	(1.648.112.585,00)	97,91
1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.166.600.000,00	2.165.100.000,00	(1.500.000,00)	99,91
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	131.954.560.600,00	131.954.560.600,00	0,00	100,00
2	BELANJA MODAL	159.456.511.478,00	137.602.403.344,52	(21.854.108.133,48)	86,21
2.1	Belanja Tanah	1.310.000.000,00	1.300.967.540,00	(9.032.460,00)	99,31

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	32.518.052.468,00	24.280.955.569,00	(8.237.096.899,00)	74,1
1.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	38.279.839.779,00	38.022.010.549,52	(257.829.229,48)	99,1
1.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.533.141.231,00	71.332.217.036,00	(9.200.924.195,00)	88,1
1.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.815.478.000,00	2.666.252.650,00	(4.149.225.350,00)	39,1
1.3	BELANJA TAK TERDUGA	3.000.000.000,00	363.087.750,00	(2.636.912.250,00)	12,1
1.3.1	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	363.087.750,00	(2.636.912.250,00)	12,1
1.1	TRANSFER	1.604.355.891,00	1.205.163.398,00	(399.192.493,00)	75,1
1.1.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	1.604.355.891,00	1.205.163.398,00	(399.192.493,00)	75,1
1.1.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.604.355.891,00	1.205.163.398,00	(399.192.493,00)	75,1
	PEMBIAYAAN				
	PEMBIAYAAN DAERAH				
1.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	52.116.607.821,00	51.846.193.454,82	(270.414.366,18)	99,1
1.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	8.641.614,00	8.641.614,00	0,0
1.2	PENGELUARAN DAERAH	692.000.000,00	0,00	(692.000.000,00)	0,0
1.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	692.000.000,00	0,00	(692.000.000,00)	0,0
	PEMBIAYAAN NETTO	51.424.607.821,00	51.846.193.454,82	421.585.633,82	100,1
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	71.738.853.648,35	71.738.853.648,35	0,0

Dompu, 28 Juli 2022
WAKIL BUPATI DOMPU

H. SYAIFUL PARSAN



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020**

NO.URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021 AUDITED	(%)	REALISASI 2020 AUDITED
4	PENDAPATAN - LRA	1027893913503.00	1,055,607,792,214.05	103.67	1,016,730,018,530.11
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	88,468,824,005.00	125,823,619,290.05	142.22	110,684,931,583.11
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	12,177,405,700.00	14,623,657,026.25	120.09	12,200,001,972.50
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	3,866,153,216.00	4,824,897,543.00	124.80	3,883,868,405.00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	1,411,393,010.00	7,581,100,537.00	537.14	9,263,076,187.00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	71,013,872,079.00	98,793,964,183.80	139.12	85,337,985,018.61
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	88,349,524,986.00	89,581,938,570.00	101.14	86,593,980,506.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	737,459,148,000.00	774,467,753,727.00	101.36	736,761,752,360.00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	14,683,120,000.00	17,903,871,475.00	121.94	15,594,374,510.00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	13,270,561,000.00	21,920,734,055.00	165.18	13,805,009,586.00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	536,299,165,000.00	536,299,165,000.00	100.00	543,072,110,000.00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	173,206,302,000.00	171,343,983,197.00	98.92	164,290,258,264.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	101,896,904,000.00	101,896,904,000.00	100.00	85,653,975,000.00
4.2.2.1	Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	26,437,628,000.00	26,437,628,000.00	100.00	0.00
4.2.2.2	Dana Desa - LRA	75,459,276,000.00	75,459,276,000.00	100.00	85,653,975,000.00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	44,139,197,866.00	44,217,280,843.00	100.18	43,524,077,706.00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	44,139,197,866.00	44,217,280,843.00	100.18	43,524,077,706.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	55,929,839,632.00	46,202,234,354.00	82.61	40,105,281,881.00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	10,349,052,433.00	5,067,097,954.00	48.96	40,105,281,881.00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	45,580,787,199.00	41,135,136,400.00	90.25	0.00
5	BELANJA	945,759,604,833.00	911,555,408,022.52	96.49	894,425,261,751.47
5.1	BELANJA OPERASI	783,303,093,355.00	771,589,916,928.00	98.89	756,179,897,455.97
5.1.1	Belanja Pegawai	431,802,418,439.00	409,302,759,598.00	94.79	432,352,912,092.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	269,762,844,308.00	285,198,939,307.00	105.72	271,932,715,363.97
5.1.5	Belanja Hibah	79,571,230,608.00	77,923,118,023.00	97.93	45,700,270,000.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,166,600,000.00	2,165,100,000.00	99.93	61,94,000,000.00
5.2	BELANJA MODAL	159,456,511,478.00	137,602,403,344.52	86.29	133,176,502,913.50
5.2.1	Belanja Tanah	1,310,000,000.00	1,300,967,540.00	99.31	155,983,340.00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	32,518,052,468.00	24,280,955,569.00	74.67	36,373,371,766.00
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	38,279,839,779.00	38,022,010,549.52	99.33	32,325,674,603.50
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	80,533,141,231.00	71,332,217,036.00	88.57	62,692,196,139.00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6,815,478,000.00	2,666,252,650.00	39.12	1,629,277,065.00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	3,000,000,000.00	363,087,750.00	12.10	5,068,861,382.00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	3,000,000,000.00	363,087,750.00	12.10	5,068,861,382.00
6	TRANSFER	133,558,916,491.00	137,159,723,998.00	99.99	132,920,903,830.00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	1,604,355,891.00	1,205,163,398.00	75.12	950,417,248.00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1,604,355,891.00	1,205,163,398.00	75.12	950,417,248.00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	131,954,560,600.00	131,954,560,600.00	99.99	131,970,486,582.00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	131,954,560,600.00	131,954,560,600.00	99.99	131,970,486,582.00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(51,424,607,821.00)	1,892,660,193.53	(38.68)	(106,161,470,513.6)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	521,116,607,821.00	51,846,193,454.82	99.48	62,732,754,872.84
7.1.1	Penggunaan SilPA	52,116,607,821.00	51,837,551,840.82	99.46	62,726,994,136.84
7.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	8,641,614.00	0.00	5,760,736.00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	692,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	692,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	51,424,607,821.00	51,846,193,454.82	100.82	62,732,754,872.84
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	7,738,853,648.35	0.00	521,116,607,821.48

Dompu, 28 Juli 2022
WAKIL BUPATI DOMPU,

H. SYAHRUL PARSAN

Lampiran II
 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu
 Nomor 0 Tahun 2022
 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021
 Kabupaten Dompu



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021 AUDITED	2020 AUDITED
Saldo Anggaran Lebih Awal	52,116,607,821.48	62,726,994,136.84
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun B	51,829,928,840.82	62,726,994,136.84
Sub Total	294,678,980.66	0.00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	71,722,330,648.35	52,116,607,821.48
Sub Total	721,790,096.25	52,116,607,821.48
Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	(27,055,980.66)	0.00
Lain-lain	0.00	0.00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	71,738,853,648.35	52,116,607,821.48

Dompu, 28 Juli 2022
 WAKIL BUPATI DOMPU,


 H. SYAHRUL PARSAN

Lampiran III
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu
Nomor 01 Tahun 2022
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021
Kabupaten Dompu



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021 AUDITED	SALDO 2020 AUDITED	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	970350.270,308.43	946394.750,469.38	23,955519,839.07	2.53
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	112075.907,142.50	106,643,195,685.01	5,432,711,457.49	5.09
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	16,255,014,683.20	13,743,246,522.75	2,511,768,160.45	18.28
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4,922,887,543.00	3,920,552,571.67	1,002,334,971.33	25.57
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	240,524,284.50	11,887,517,229.92	(11,646,992,945.42)	(97.98)
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	90,657,480,631.80	77,091,879,360.67	13,565,601,271.13	17.60
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	807,266,452,060.00	794,726,552,574.00	125,398,99,486.00	1.58
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	732,111,785,655.00	743,148,322,873.00	(11,036,537,218.00)	(1.49)
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	26,437,628,000.00	12,202,472,000.00	14,235,156,000.00	116.66
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	48,717,038,405.00	39,375,757,701.00	9,341,280,704.00	23.72
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	51,007,911,105.95	45,025,002,210.37	5,982,908,895.58	13.29
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	51,007,911,105.95	45,025,002,210.37	5,982,908,895.58	13.29
8.3.2	Dana Darurat - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9		990153,846,013.13	959,595,354,774.53	30,558,491,238.60	3.18
9.1.1	Beban Pegawai - LO	409,302,759,598.00	432,352,912,092.00	(23,050,152,494.00)	(5.33)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa - LO	290,056,619,030.25	276,068,387,366.77	13,988,231,663.48	5.07
9.1.3	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.4	Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.5	Beban Hibah	84,945,469,823.00	45,700,270,000.00	39,245,199,823.00	85.88
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	2,165,100,000.00	6,194,000,000.00	(4,028,900,000.00)	(65.05)
9.1.7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	31,743,954,548.00	31,439,989,978.00	303,964,570.00	0.97
9.1.8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14,849,482,001.00	14,190,238,069.00	659,243,932.00	4.65
9.1.9	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	97,851,359,028.00	92,600,708,342.00	5,250,650,686.00	5.67
9.1.10	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.11	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.13	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	98,708,374.13	232,481,874.94	(133,773,500.81)	(57.54)
9.1.14	Beban Penyisihan Piutang	1,439,945,612.75	1,393,718,721.82	46,226,890.93	3.32
9.1.15	Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Beban Transfer	57,700,447,998.00	59,422,648,330.00	(1,722,200,332.00)	(2.90)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(19,803,575,704.68)	(13,200,604,305.15)	(6,602,971,399.53)	50.02
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	40,958,550.25	15,226,376.25	25,732,174.00	0.00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	3,562,198,295.00	5,572,670,204.00	(2,010,471,909.00)	(36.08)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON	(3,521,239,744.75)	(5,557,443,827.75)	2,036,204,083.00	(36.64)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(23,324,815,449.43)	(18,758,048,132.90)	(4,566,767,316.53)	24.35
	POS LUAR BIASA				
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Beban Luar Biasa	363,087,750.00	5,068,861,382.00	(4,705,773,632.00)	0.00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(363,087,750.00)	(5,068,861,382.00)	4,705,773,632.00	0.00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(23,687,903,199.43)	(23,826,909,514.90)	139,006,315.47	(0.58)

Dompu, 28 Juli 2022
WAKIL BUPATI DOMPU,

H. SYAHRUL PARISAN

Lampiran IV
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu
Nomor 01 Tahun 2022
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021
Kabupaten Dompu



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021 AUDITED	2020 AUDITED
EKUITAS AWAL		
SURPLUS/DEFISIT-LO	1,711,472,391,233.87	1,743,711,459,936.73
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	(23,687,903,199.43)	(23,826,909,514.90)
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Koreksi ekuitas lainnya	23,806,964,283.80	(8,412,159,187.96)
EKUITAS AKHIR	1,711,591,452,318.23	1,711,472,391,233.87

Dompu, 28 Juli 2021
WAKIL BUPATI DOMPU,


H. SYAHRUL PARSAN

Lampiran V
Peraturan Daerah Kabupaten Dompus
Nomor 01 Tahun 2022
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021
Kabupaten Dompus



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
NERACA

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021 AUDITED	2020 AUDITED
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	51,279,639,690.63	44,471,304,952.17
Kas di Bendahara Penerimaan	308,001,766.00	220,303,123.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	28,944,048.00	28,275,945.00
Kas di BLUD	20,190,068,403.00	7,140,492,643.00
Kas di Bendahara FKTP	22,545,955.65	111,327,274.24
Kas di Bendahara BOS	258,994,902.02	385,799,205.00
Kas Lainnya	57,674,700.00	21,565,795.83
Setara Kas	0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
Piutang Pendapatan	22,361,540,046.50	22,977,393,040.00
Piutang Lainnya	6,153,522,692.00	13,654,603,100.00
Penyisihan Piutang	(7,511,062,618.25)	(6,104,695,254.25)
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
Persediaan	20,253,332,541.94	25,868,240,654.31
JUMLAH ASET LANCAR	113,402,412,127.49	108,774,610,478.30
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lain	0.00	0.00
Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00
Dana Bergulir	2,988,249,229.00	2,996,890,843.00
Penyisihan Dana Bergulir	(2,988,249,229.00)	(2,996,890,843.00)
Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00
Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00
Penyisihan atas Investasi Non Permanen (NRV)	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	119,124,48,444.82	109,109,149,266.84
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	119,124,48,444.82	109,109,149,266.84
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	119,124,248,444.82	109,109,149,266.84
ASET TETAP		
Tanah	89,945,230,204.00	83,293,111,664.00
Peralatan dan Mesin	319,965,004,374.07	303,237,979,209.07
Gedung dan Bangunan	725,744,234,260.84	692,683,785,204.92
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,168,678,339,019.00	1,096,807,775,407.00
Aset Tetap Lainnya	34,394,418,711.00	32,274,111,061.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17,000,000.00	8,199,136,543.21
Akumulasi Penyusutan	(857,400,457,628.07)	(722,365,126,160.07)
JUMLAH ASET TETAP	1,481,345,508,940.84	1,494,130,772,929.13

DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	1,964,471,948.21	1,881,486,292.21
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(1,703,990,379.88)	(1,703,990,379.88)
Aset Tidak Berwujud	840,855,009.00	475,941,177.92
Aset Lain-lain	13,805,514,480.80	13,887,302,937.80
Denda Keterlambatan	0.00	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	14,906,481,058.13	14,540,740,028.05
JUMLAH ASET	1,728,778,60,571.28	1,726,555,272,702.32
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	11,80,264.00	20,173,522.00
Utang Bunga	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	374,26,245.12	292,745,552.24
Utang Beban	0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	16,801,11,743.93	14,769,962,394.21
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	17,187,218,253.05	15,082,881,468.45
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	17,187,218,253.05	15,082,881,468.45
EKUITAS		
EKUITAS	1,711,591,52,318.23	1,711,472,391,233.87
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,728,778,670,571.28	1,726,555,272,702.32

Dompu, 28 Juli 2022
WAKIL BUPATI DOMPU,


ASYAHRUL PARSAN

Lampiran VI
 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu
 Nomor 01 Tahun 2022
 Tentang Peranggiawaban Pelaksanaan APBD TA 2021
 Kabupaten Dompu



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
 LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	(Dalam Rupiah)	
		2021 AUDITED	2020 AUDITED
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	14,6 23,657,026.25	12,200,001,972.50
4	Hasil Retribusi Daerah	4,824,897,543.00	3,883,868,405.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,581,100,537.00	9,263,076,187.00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93,7 93,964,183.80	85,336,033,018.61
7	Bagi Hasil Pajak	17,903,871,475.00	15,594,374,510.00
8	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	21,920,734,055.00	13,805,009,586.00
9	Dana Alokasi Umum	535,299,165,000.00	543,072,110,000.00
10	Dana Alokasi Khusus	171,343,983,197.00	164,290,258,264.00
11	Pendapatan Lainnya Yang Sah	0.00	0.00
12	Pendapatan Hibah	4,202,234,354.00	40,105,281,881.00
13	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00
14	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	44,217,280,843.00	43,524,077,706.00
15	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	101,896,904,000.00	85,653,975,000.00
16	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0.00	0.00
17	Penerimaan Lainnya	0.00	0.00
18	Penerimaan dari Penyesuaian Belanja (contra pos)	0.00	0.00
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)	1,065,607,792,214.05	1,016,728,066,530.11
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	409,302,759,598.00	432,352,912,092.00
22	Pembayaran Barang dan Jasa	285,198,939,307.00	271,932,715,363.97
23	Pembayaran Bunga	0.00	0.00
24	Pembayaran Subsidi	0.00	0.00
25	Pembayaran Hibah	77,923,118,023.00	45,700,270,000.00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	2,165,100,000.00	6,194,000,000.00
27	Pembayaran Tak Terduga	363,087,750.00	5,068,861,382.00
28	Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak & Bantuan Keuangan Kpd Desa	133,159,723,998.00	132,920,903,830.00
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0.00	0.00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0.00	0.00
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)	908,112,728,676.00	894,169,662,667.97
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32)	157,495,063,538.05	122,558,403,862.14
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00
37	Penjualan atas Tanah	0.00	0.00
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
41	Penjualan Aset Tetap	0.00	0.00
42	Penjualan Aset Lainnya	0.00	0.00
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0.00	0.00
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)	0.00	0.00
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00
48	Perolehan Tanah	1,300,967,540.00	155,983,340.00
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	24,280,955,569.00	36,373,371,766.00
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	38,022,010,549.52	32,325,674,603.50
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	71,332,217,036.00	62,692,196,139.00
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2,666,252,650.00	1,629,277,065.00
53	Perolehan Aset Lainnya	0.00	0.00
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0.00	0.00
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)	137,602,403,344.52	133,176,502,913.50
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)	(137,602,403,344.52)	(133,176,502,913.50)

58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00
61	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	1,952,000.00
62	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00
63	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00
64	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00
65	Penerimaan dari Hasil Investasi	0.00	0.00
66	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	8,641,614.00	5,76,0736.00
67		0.00	0.00
68		0.00	0.00
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)	8,641,614.00	7,712,736.00
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)	0.00	0.00
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)	8,641,614.00	7,712,736.00
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan atas Setoran Pengembalian Belanja (Contra Post) dan Lainnya		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	47,923,181,825.00	44,206,099,842.00
	Penerimaan Pencairan Deposito	0.00	0.00
84	Penerimaan Pajak Catering	610,000.00	662,500.00
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)	47,923,791,825.00	44,206,762,342.00
86	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4,931,875,083.00	44,185,926,320.00
	Pembentukan Deposito	0.00	0.00
	Pengeluaran Pajak Catering 2020	662,500.00	0.00
	Koreksi Saldo Awal Dana Bos	278,812,156.00	0.00
87	Koreksi Saldo Awal Dana Kapitasi	0.59	0.00
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)	48,211,334,973,959	44,185,926,320.00
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 -87)	(27,557,914.59)	20,836,022.00
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)	19,63,743,892.94	(10,589,550,293.36)
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	52,137,200,019.41	62,726,750,312.77
	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)	715,0943,912.35	52,137,200,019.41
92	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	308,001,766.00	220,303,123.00
93	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan FKTP	157,674,700.00	21,565,795.83
94	Saldo Akhir Kas (92+93)	72,116,620,378.35	52,379,068,938.24

Dmpu, 28 Juli 2022
WAKIL BUPATI DOMPU,


H. SYAHRUL PARSAN